

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA GUHA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN

Nurul Azkia¹, Siti Raudah², Moh. Fajar Noorrahman³,
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: nazkia2020@gmail.com

ABSTRAK

Keterlibatan warga merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan desa. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memotret dinamika partisipasi masyarakat di Desa Guha, Kabupaten Balangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik triangulasi untuk menjaga kredibilitas hasil. Temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di Desa Guha masih tergolong rendah. Masyarakat belum terlibat secara menyeluruh, mulai dari tahap penggalian aspirasi hingga evaluasi hasil pembangunan. Kendala utama yang ditemukan meliputi minimnya akses informasi, sosialisasi yang kurang masif, serta lemahnya koordinasi antara perangkat desa dan warga. Meskipun wadah seperti musyawarah desa (Musrenbangdes) sudah tersedia, fungsinya belum optimal dalam menciptakan ruang yang inklusif. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas ruang dialog bagi semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, warga diharapkan lebih proaktif dalam mengawal kebijakan desa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi pada aspek kepemimpinan dan budaya lokal agar didapatkan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbangdes

ABSTRACT

Community involvement is a key foundation for ensuring the success and sustainability of village development programs. This qualitative research aims to capture the dynamics of community participation in Guha Village, Balangan Regency, and identify influencing factors. Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, observation, and documentation, using triangulation techniques to ensure the credibility of the results. Field findings indicate that the level of participation in Guha Village remains relatively low. Community involvement is not yet comprehensive, from the outreach stage to the evaluation of development outcomes. The main obstacles identified include limited access to information, insufficient outreach, and weak coordination between village officials and residents. Although a forum such as the village deliberation (Musrenbangdes) is in place, its function is not optimal in creating an inclusive space. To address this issue, the village government is advised to increase transparency and expand dialogue for all levels of society. Residents are also encouraged to be more proactive in overseeing village policies. Future researchers are advised to expand the scope of their studies to include aspects of leadership and local culture to develop a more comprehensive and participatory development strategy.

Keywords: Community Participation, Village Development Planning, Musrenbangdes

PENDAHULUAN

Eksistensi suatu organisasi pada dasarnya merupakan manifestasi dari keinginan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang mustahil diraih secara individual. Namun, pembentukan wadah tersebut barulah langkah awal. Keberhasilan dalam merealisasikan visi organisasi sangat bergantung pada efektivitas sistem manajemen yang diterapkan. Manajemen bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah seni dan ilmu dalam menyelaraskan berbagai instrumen pendukung agar bergerak seirama. Dalam upaya mencapai target yang telah

ditetapkan, setiap organisasi harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Sumber daya ini mencakup kekayaan alam, ketersediaan modal finansial, adopsi teknologi terkini, hingga standarisasi mekanisme kerja yang efisien. Tanpa adanya tata kelola yang sistematis, aset-aset berharga tersebut hanya akan menjadi tumpukan potensi yang statis dan tidak memberikan dampak nyata bagi kemajuan organisasi.

Di tengah keberagaman instrumen pendukung tersebut, faktor manusia menempati kasta tertinggi sebagai elemen yang paling krusial. Manusia bukan sekadar "sumber daya" dalam pengertian mekanistik, melainkan subjek intelektual yang memiliki kemampuan kognitif untuk mengelola, mengarahkan, dan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Secanggih apa pun teknologi yang digunakan atau sebesar apa pun modal yang dikururkan, efektivitasnya tetap bermuara pada kualitas individu yang mengoperasikannya. Dalam konteks organisasi publik, peran ini menjadi semakin kompleks. Pemerintah, sebagai representasi organisasi publik terbesar, memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi rutin, tetapi juga mencakup akselerasi pembangunan dan penyelenggaraan administrasi yang transparan demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sinergi antara manajemen yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas serta kemajuan suatu bangsa.

Beralih pada skala yang lebih mikro namun fundamental, yakni pembangunan tingkat desa, paradigma yang digunakan kini telah mengalami pergeseran signifikan. Pembangunan desa saat ini tidak lagi dipandang sebagai agenda top-down yang sepenuhnya menjadi beban pemerintah desa. Sebaliknya, partisipasi aktif masyarakat kini dipandang sebagai ruh dari setiap kebijakan yang diambil. Konsep pembangunan yang ideal menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek atau penerima manfaat pasif, melainkan sebagai subjek atau aktor utama yang memiliki hak suara dalam menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Salah satu instrumen krusial dalam mengakomodasi aspirasi ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi ruang dialektika bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan riil di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang lahir benar-benar bersifat organik dan solutif, bukan sekadar proyek formalitas yang tidak tepat sasaran.

Urgensi keterlibatan publik dalam pembangunan ini pun telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap tahapan pembangunan nasional harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menuntut adanya inklusivitas, di mana seluruh lapisan masyarakat diberikan ruang untuk berkontribusi. Dengan adanya landasan hukum ini, masyarakat memiliki posisi tawar yang strategis, mulai dari tahapan perencanaan awal, proses implementasi di lapangan, hingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Pengawasan masyarakat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk memastikan bahwa setiap sen dana desa dikelola secara akuntabel dan memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan.

Dalam memotret implementasi nyata dari potensi pembangunan ini, Desa Guha menjadi contoh menarik melalui kekayaan aset fisik dan non-fisik yang dimilikinya. Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI), Desa Guha telah berhasil melakukan akumulasi aset infrastruktur yang cukup representatif dalam satu dekade terakhir. Secara fisik, desa ini didukung oleh fasilitas perkantoran dan pendidikan yang memadai. Keberadaan Kantor Desa yang representatif sejak tahun 2015 menjadi pusat pelayanan administrasi bagi warga. Selain itu, investasi pada sektor pendidikan non-formal dan sosial terlihat dari pembangunan Gedung TPA di berbagai titik, seperti TPA pusat pada 2016, Gedung Aset di RT 003, hingga perluasan TPA di RT 002 pada tahun 2019. Fasilitas-fasilitas ini menunjukkan komitmen desa dalam membangun aspek spiritual dan intelektual generasi mudanya.

Tidak hanya berhenti pada fasilitas bangunan, Desa Guha juga menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui pembangunan Tower Jaringan Internet pada tahun 2020. Langkah ini merupakan lonjakan strategis untuk memutus isolasi digital dan membuka akses

informasi seluas-luasnya bagi masyarakat desa. Dari sisi estetika dan identitas wilayah, pembangunan Gerbang Desa pada 2024 serta Gerbang Gang pada 2025 menjadi simbol kemajuan fisik yang memberikan kebanggaan bagi warga. Fasilitas olahraga pun tidak luput dari perhatian dengan hadirnya Lapangan Bola Volly yang dibangun pada 2019, yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial sekaligus sarana peningkatan kesehatan masyarakat.

Sektor ekonomi kerakyatan di Desa Guha juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur jalan yang terencana. Keberadaan Jalan Usaha Tani (JUT) di berbagai titik, seperti JUT Panyiuran di RT 01 sepanjang 280 meter dan JUT Lahung di RT 03 sepanjang 300 meter, menjadi urat nadi bagi mobilisasi hasil pertanian masyarakat. Aksesibilitas ini sangat krusial mengingat efisiensi transportasi akan berdampak langsung pada biaya produksi dan daya saing produk lokal. Selain jalan, konektivitas antarwilayah juga diperkuat dengan pembangunan jembatan-jembatan strategis. Sejak tahun 2017 hingga 2024, desa ini secara konsisten membangun dan merehabilitasi jembatan, mulai dari Jembatan Layung, Jembatan Canting, Jembatan Binjai Manis, hingga yang terbaru adalah Jembatan Ulin Tangang. Keberadaan infrastruktur fisik yang masif ini tentu memerlukan pola pemeliharaan yang berbasis masyarakat agar masa pakainya dapat bertahan lama.

Namun, kekuatan Desa Guha tidak hanya terletak pada benda mati berupa infrastruktur. Kekuatan yang sesungguhnya berada pada aset non-fisik berupa kelembagaan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kelembagaan seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan keluarga. Di sisi lain, kelompok-kelompok seperti Kelompok Tani dan Gaboksar menjadi mesin penggerak ekonomi di level akar rumput. Selain itu, kearifan lokal dan nilai-nilai religiusitas tetap terjaga melalui aktifnya kelompok-kelompok kesenian dan keagamaan seperti Kelompok Burdah dan Kelompok Habsyi. Wadah-wadah sosial ini bukan sekadar organisasi formal di atas kertas, melainkan ruang bagi warga untuk saling berinteraksi, bergotong-royong, dan menyalurkan aspirasi mereka dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari bidang ekonomi hingga pelayanan publik.

Pembangunan Desa Guha merupakan sebuah orkestrasi antara ketersediaan aset fisik yang memadai dengan penguatan modal sosial (social capital). Kesuksesan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari megahnya bangunan kantor atau panjangnya jalan beton, tetapi dari sejauh mana aset-aset tersebut mampu dikelola oleh tangan-tangan masyarakat yang berdaya. Integrasi antara manajemen organisasi pemerintah desa yang transparan dengan partisipasi masyarakat yang militan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang ada, Desa Guha berpeluang besar untuk bertransformasi menjadi desa yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan kultural, selaras dengan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Meski kaya potensi fisik dan non-fisik, partisipasi warga Desa Guha, Balangan dalam perencanaan pembangunan masih menemui hambatan. Hasil pengamatan mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghalangi kontribusi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat desa tersebut.

1. Rendahnya Partisipasi dalam Musrenbangdes: Kehadiran masyarakat dalam forum perencanaan desa masih minim dan cenderung pasif. Akibatnya, banyak aspirasi warga yang tidak terserap secara optimal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
2. Dominasi Perangkat Desa dalam Implementasi: Pelaksanaan program masih terpusat pada birokrasi desa. Kurangnya ruang bagi warga untuk berkontribusi melalui ide maupun pengawasan membuat masyarakat hanya menjadi penerima manfaat tanpa keterlibatan aktif.
3. Lemahnya Evaluasi dan Pemeliharaan: Kepedulian warga terhadap keberlanjutan hasil pembangunan masih sangat rendah. Setelah proyek selesai, masyarakat jarang dilibatkan dalam merawat atau mengevaluasi fasilitas publik seperti jalan desa.
4. Keterbatasan Literasi Perencanaan: Minimnya pemahaman warga mengenai alur birokrasi, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan prioritas, menghambat kualitas usulan. Hal ini membuat masyarakat sulit memberikan kontribusi yang relevan dan strategis.

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara

terhadap pemenuhan kebutuhan warganya. Jika merujuk pada definisi dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Mustanir (2022:19), pelayanan diartikan sebagai sebuah upaya sistematis guna membantu menyiapkan atau mengelola segala keperluan yang dibutuhkan oleh orang lain. Dalam konteks yang lebih luas dan formal, Sabir dkk. (dalam Mustanir 2022:19) menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas tunggal, melainkan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan sesuai koridor hukum bagi setiap penduduk. Hal ini mencakup penyediaan barang, jasa, hingga urusan administratif yang dikelola oleh institusi negara, korporasi, maupun lembaga independen yang diberikan mandat oleh undang-undang. Keseluruhan proses ini digerakkan oleh para pejabat dan staf yang bekerja dalam organisasi penyelenggara sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan tindakan pelayanan tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut, payung hukum utama di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, memberikan batasan yang serupa namun tegas mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara. Penekanan utama dari regulasi ini adalah legalitas dan ketersediaan layanan administratif maupun barang/jasa bagi publik. Perspektif para ahli kemudian memperkaya definisi ini dengan dimensi yang lebih fungsional. Dwiyanto (dalam Mustanir 2022:19) misalnya, melihat pelayanan publik sebagai rangkaian aktivitas birokrasi yang berorientasi pada kepuasan pengguna atau warga negara. Sementara itu, Sinambela (dalam Mustanir 2022:19) menitikberatkan pada aspek prosedural, di mana pemberian layanan harus selaras dengan tata cara dan aturan pokok yang telah disepakati sebelumnya. Dari sudut pandang manajerial, Mahmudi (dalam Mustanir 2022:19) melihatnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi bentuk implementasi dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompleksitas pelayanan ini juga disinggung oleh Siriattakul dkk. (dalam Mustanir 2022:21), yang memperjelas bahwa aktor dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pegawai pemerintah, tetapi mencakup seluruh individu dalam organisasi yang memiliki fungsi memberikan layanan administratif atau jasa. Semua entitas ini, baik yang berbentuk badan hukum maupun lembaga independen, dibentuk dengan satu tujuan utama, yakni mendedikasikan kegiatannya demi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pelayanan publik adalah sebuah ekosistem yang melibatkan aturan, institusi, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi.

Pelayanan publik yang efektif tidak dapat dipisahkan dari peran aktif masyarakat itu sendiri, yang sering disebut sebagai partisipasi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (1996:56), partisipasi secara sederhana dimaknai sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dalam sebuah aktivitas. Namun, partisipasi lebih dari sekadar kehadiran fisik; ia melibatkan keterikatan emosional dan intelektual. Seseorang yang berpartisipasi berarti ia menyatukan pikiran dan perasaannya dalam kegiatan tersebut karena ia merasa hal itu penting dan bermanfaat. Isbandi dkk. (dalam Mustanir dkk., 2022:32) memperluas definisi ini ke dalam ranah sosiologis, di mana partisipasi dipandang sebagai keterlibatan kolektif masyarakat mulai dari tahap identifikasi masalah, penggalan potensi, pengambilan keputusan untuk solusi alternatif, hingga fase evaluasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam konteks hubungan antara rakyat dan penguasa, Prasadja (dalam Agustina, 2022:34) memotret partisipasi sebagai kontribusi yang terorganisir dari masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah. Di sini, posisi pemerintah dan masyarakat dipandang setara sebagai mitra yang saling membutuhkan. Selain itu, Theresia dkk. (dalam Rizal, 2022:56) menyederhanakan makna partisipasi sebagai tindakan nyata untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan dengan harapan memperoleh manfaat tertentu darinya. Melalui pemahaman ini, partisipasi bukan lagi sebuah beban, melainkan kebutuhan bagi masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Untuk mengukur sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) membagi bentuk partisipasi ke dalam empat kategori utama. Pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan tahap krusial karena

di sinilah masyarakat ikut menentukan arah pembangunan melalui diskusi atau rapat. Kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan, di mana masyarakat berkontribusi secara nyata melalui tenaga, uang, atau material dalam proyek pembangunan. Ketiga adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang merujuk pada bagaimana masyarakat menggunakan, merawat, dan melestarikan apa yang telah dibangun. Terakhir adalah partisipasi dalam evaluasi, yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan tidak melenceng dari tujuan awal.

Selain kategori tersebut, Dusseldorp (dalam Kumiyati, 2019:55) mengidentifikasi aktivitas spesifik yang menunjukkan partisipasi, seperti menjadi anggota kelompok organisasi, terlibat dalam diskusi, hingga menggerakkan sumber daya komunitas. Di sisi lain, kedalaman partisipasi itu sendiri memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Wilcox (dalam Theresia 2014:202) menjelaskan lima gradasi partisipasi, dimulai dari sekadar menerima informasi, kemudian konsultasi di mana masyarakat memberi masukan namun tidak terlibat dalam eksekusi, berlanjut ke pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama sebagai mitra pelaksana, hingga tingkat tertinggi yaitu memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif mandiri masyarakat. Semakin tinggi tingkatannya, maka rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap hasil pembangunan akan semakin kuat.

Kualitas partisipasi tidak muncul di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Slamet (2014:97) mengklasifikasikan faktor internal yang berasal dari jati diri individu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan. Faktor-faktor sosiologis ini sangat menentukan perilaku seseorang dalam merespons ajakan partisipasi. Di sisi lain, Sunarti (2013:9) menyoroti faktor eksternal atau peran stakeholder sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap keberhasilan sebuah program. Keberhasilan partisipasi itu sendiri, menurut Slamet (dalam Theresia 2014:207), bersandar pada tiga pilar utama: adanya kesempatan yang diberikan oleh penyelenggara, adanya kemauan atau motivasi dari dalam diri masyarakat, serta adanya kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk berkontribusi.

Meskipun partisipasi sangat ideal, kenyataannya sering ditemukan berbagai hambatan di lapangan. Soetrisno (dalam Theresia 2014:211) mengungkapkan bahwa kendala utama sering kali berakar pada ketidakpahaman para perencana pembangunan mengenai makna sejati dari partisipasi. Sering kali, partisipasi hanya dianggap sebagai bentuk dukungan pasif terhadap rencana pemerintah yang sudah jadi, bukan sebagai proses dialogis dari bawah ke atas. Selain itu, gaya birokrasi yang otoriter dan regulasi yang terlalu kaku sering kali justru meredam semangat masyarakat untuk terlibat secara aktif. Oleh karena itu, mengubah paradigma dari masyarakat sebagai objek menjadi subjek pembangunan adalah langkah fundamental untuk menciptakan pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar partisipatif serta berkelanjutan.

Secara etimologis, istilah "masyarakat" membawa pesan mendalam tentang kebersamaan, di mana akar katanya berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti keterlibatan atau partisipasi, serta bahasa Latin *socius* yang bermakna kawan (UIN Suska, 2020). Selo Soemardjan (1962) memberikan fondasi awal dengan melihat masyarakat sebagai sebuah ruang kehidupan sosial yang diikat oleh derajat hubungan tertentu. Pandangan ini diperluas oleh Koentjaraningrat (2002:150) yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terikat dalam interaksi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Paul B. Harton (dalam Latif dkk., 2023:116) yang menekankan aspek kemandirian dan kesamaan budaya dalam suatu wilayah yang dihuni dalam jangka waktu lama, sementara Abdul Syani (dalam Latif dkk., 2023:116) melihat esensi masyarakat pada kekuatan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antar anggotanya.

Dalam perkembangannya, Soemardjan (dalam Soekanto, 2013:49) membagi tipologi masyarakat Indonesia ke dalam tiga fase evolusi: sederhana, madya, dan modern. Masyarakat sederhana masih menggantungkan hidup pada adat istiadat yang kental, ikatan kekeluargaan yang sakral, dan kepercayaan pada hal gaib. Memasuki fase masyarakat madya, rasionalitas

mulai tumbuh dan hukum tertulis mulai mendampingi tradisi, meskipun hubungan sosial masih cukup hangat. Pada puncaknya, masyarakat modern atau pra-modern ditandai dengan orientasi pada kepentingan pribadi, profesionalisme yang tinggi, serta ketergantungan mutlak pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Transformasi ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah entitas dinamis yang perilakunya senantiasa dipandu oleh pergeseran nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya.

Transisi masyarakat tersebut membutuhkan manajemen yang matang melalui perencanaan. Baskoro dkk. (2021:18) mendefinisikan perencanaan sebagai aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai target dalam periode tertentu. Para pakar seperti Ery Sunary dan Jacqueline Alder (dalam Baskoro dkk., 2021:18-19) sepakat bahwa perencanaan adalah cara rasional untuk memetakan masa depan melalui strategi dan tahapan yang jelas. Lebih jauh, Steiner dan John Douglas menekankan bahwa perencanaan merupakan siklus berkesinambungan yang melibatkan evaluasi serta umpan balik. Agar perencanaan ini efektif, diperlukan implementasi delapan asas utama, termasuk asas tujuan (*contribution to objective*), efisiensi, dan komunikasi, guna menjamin bahwa setiap sumber daya digunakan secara tepat sasaran dan transparan.

Pada akhirnya, seluruh proses perencanaan ini bermuara pada pembangunan. Merujuk pada pemikiran para ahli dalam Afni dkk. (2024:1-3), W.W. Rostow melihat pembangunan sebagai perjalanan linear dari tatanan tradisional menuju modernitas multidimensional. Berbeda dengan perkembangan yang terjadi secara alami, Pontoh dan Kustiwan menegaskan bahwa pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Kartz serta Subandi (dalam Afni dkk., 2024:1-3) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa pembangunan adalah ikhtiar rasional untuk mengubah keadaan yang kurang bernilai menjadi lebih berkualitas dan sempurna. Dengan demikian, keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada sejauh mana perencanaan yang disusun mampu mengakomodasi karakteristik masyarakatnya demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

METODE

Berikut adalah penyusunan kembali metodologi penelitian tersebut dalam bentuk narasi paragraf yang mengalir secara komprehensif, humanis, dan tetap menjaga standar akademik agar bebas dari plagiarisme.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Guha, yang secara administratif terletak di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71663. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja untuk memotret realitas partisipasi masyarakat perdesaan dalam konteks pembangunan daerah. Dalam upaya memahami fenomena sosial ini secara utuh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologis utama. Menurut Sugiyono (2018:213), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berpijak pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Melalui pendekatan ini, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis datanya bersifat induktif, dengan hasil yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi numerik. Pendekatan ini dirasa sangat relevan karena tujuan riset adalah untuk mendeskripsikan aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu maupun kelompok terkait bagaimana mereka terlibat dalam proses pembangunan di lingkungannya.

Lebih lanjut, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena perilaku manusia melalui data non-numerik. Peneliti berusaha mengeksplorasi dan menggambarkan interpretasi warga serta pemerintah desa mengenai keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya sekadar mengamati, tetapi juga berusaha menyelami pengalaman dan proses yang dialami oleh para pemangku kepentingan di Desa Guha. Sesuai dengan sifat riset kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk informasi lisan dan tulisan yang menggambarkan

fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai bentuk keterlibatan warga serta faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses perencanaan tersebut.

Terkait dengan data yang digunakan, penelitian ini mengandalkan data kualitatif sebagai sumber informasi utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Hardani dkk. (2020:246), data dalam penelitian dapat dibedakan berdasarkan wujudnya menjadi kualitatif dan kuantitatif. Dalam konteks ini, data kualitatif digunakan untuk menangkap esensi partisipasi masyarakat yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan melalui uraian dan penjelasan mengenai kondisi sosial. Hardani dkk. (2020:167) juga menambahkan bahwa penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif sangat penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggabungkan data primer yang didapat langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, dengan data sekunder yang berupa dokumen resmi atau laporan dari Kantor Desa Guha untuk memperkuat analisis.

Proses penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan pandangan Sugiyono (2010:32), purposive sampling adalah metode penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh benar-benar representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih 13 orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai perencanaan pembangunan di Desa Guha. Informan tersebut mencakup jajaran pemerintah desa seperti Kepala Desa (Ahmad Rajib), Sekretaris Desa (Ridha Ansyar), dan Kaur Umum (Norliani), serta perwakilan lembaga desa seperti BPD (Misrawati dan Bahri). Selain itu, untuk mendapatkan perspektif dari akar rumput, peneliti juga mewawancarai Ketua RT, Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat seperti Salman dan Abdul Halim, kader desa, hingga warga biasa seperti Misran dan Helma Sari. Keanekaragaman informan ini bertujuan agar data yang dihasilkan bersifat objektif dan mampu menggambarkan realitas dari berbagai sudut pandang.

Dalam menjalankan operasional penelitian, peneliti mengacu pada kerangka teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12). Teori ini membagi keterlibatan masyarakat ke dalam empat dimensi krusial. Pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang diukur dari kehadiran dan keberanian warga memberikan usulan saat musyawarah desa. Kedua adalah partisipasi dalam implementasi, yang meninjau sejauh mana warga berkontribusi tenaga atau dana dalam proyek fisik pembangunan. Ketiga adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang menitikberatkan pada tanggung jawab warga dalam memelihara apa yang telah dibangun. Keempat adalah partisipasi dalam evaluasi, yaitu bagaimana warga memberikan umpan balik, kritik, maupun saran terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai. Keempat indikator inilah yang menjadi kompas bagi peneliti dalam mengumpulkan dan membedah data di lapangan.

Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menerapkan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2023:297), observasi merupakan fondasi dari segala ilmu pengetahuan karena memungkinkan ilmuwan bekerja berdasarkan fakta dunia nyata. Peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap aktivitas warga selama proses perencanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, teknik wawancara digunakan sebagai sarana pertukaran ide. Esterberg dalam Sugiyono (2023:304) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi dua orang untuk membangun makna mengenai topik tertentu. Melalui tanya jawab yang mendalam, peneliti dapat menangkap hal-hal yang bersifat personal dan keyakinan dari para informan. Sementara itu, dokumentasi berperan sebagai pelengkap yang memberikan bukti catatan peristiwa masa lalu, baik berupa teks maupun gambar, yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi (Sugiyono, 2023:314).

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data secara induktif dan interaktif sebagaimana model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023:321). Proses analisis ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berjalan secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian. Aktivitas pertama adalah reduksi data, di

mana peneliti merangkum dan memilah informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023:323). Selanjutnya adalah penyajian data (data display) yang mayoritas dilakukan dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami (Sugiyono, 2023:325). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sugiyono (2023:329-330) menegaskan bahwa kesimpulan awal yang masih bersifat tentatif akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang konsisten saat peneliti kembali ke lapangan.

Guna menjamin bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya dan memiliki validitas yang tinggi, peneliti melakukan uji kredibilitas data. Kredibilitas riset kualitatif sangat bergantung pada pengakuan informan bahwa temuan peneliti sesuai dengan realitas yang mereka alami. Berdasarkan arahan Sugiyono (2020:189), kredibilitas data diuji melalui pengecekan dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Peneliti menerapkan perpanjangan pengamatan untuk membangun kedekatan lebih dalam dengan subjek, serta meningkatkan ketekunan dalam mencatat setiap detail peristiwa secara sistematis. Selain itu, teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari sumber yang berbeda (triangulasi sumber) dan teknik yang berbeda (triangulasi metode). Langkah terakhir yang diambil adalah member check, yaitu mengonfirmasikan kembali temuan penelitian kepada para pemberi data untuk memastikan bahwa tidak ada salah interpretasi. Dengan seluruh rangkaian metodologi ini, diharapkan penelitian mengenai partisipasi masyarakat di Desa Guha dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara ilmiah dan praktis.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Guha Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

a. Kehadiran dalam Musyawarah Perencanaan

Temuan dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa keterlibatan warga Desa Guha dalam agenda Musrenbangdes maupun Musdes masih jauh dari kategori optimal. Kondisi ini dipicu oleh pola partisipasi yang cenderung bersifat perwakilan dan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Akibatnya, aspirasi yang muncul dalam forum belum mampu memotret kebutuhan riil seluruh lapisan masyarakat secara utuh. Keterbatasan ini menyebabkan ruang partisipasi di Desa Guha menjadi eksklusif dan tidak menyeluruh.

Apabila kita meninjau fenomena ini menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (sebagaimana dikutip dalam Hutagalung, 2022), terdapat kesenjangan yang cukup lebar. Teori tersebut menegaskan bahwa partisipasi ideal menuntut keterlibatan publik secara luas sejak tahap perencanaan. Namun, realitas di Desa Guha memperlihatkan tingkat kehadiran yang sangat kontras dengan prinsip keterlibatan aktif tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kehadiran dalam Musrenbangdes belum memenuhi standar efektivitas. Forum tersebut dinilai gagal dalam mewujudkan partisipasi yang bersifat representatif dan merata, karena belum mampu merangkul seluruh elemen warga desa untuk bersuara secara langsung dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.

b. Memberikan pendapat atau usulan dalam rapat

Temuan lapangan melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterlibatan warga Desa Guha dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat terbatas. Kendala utama muncul dari mekanisme undangan yang selektif, di mana forum musyawarah hanya menyasar perwakilan tertentu. Akibatnya, mayoritas penduduk kehilangan akses langsung untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam forum pun, dinamika yang tercipta cenderung satu arah; audiens lebih banyak bersikap pasif, sementara gagasan pembangunan masih didominasi oleh figur otoritas

formal seperti perangkat desa, BPD, dan Ketua RT.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan dengan teori partisipasi Cohen dan Uphoff. Merujuk pada pemikiran mereka (dalam Hutagalung, 2022:12), partisipasi yang ideal seharusnya mencakup keterlibatan publik secara inklusif dan merata dalam pengambilan keputusan. Di Desa Guha, efektivitas partisipasi terhambat bukan hanya karena dominasi kelompok elit desa, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang mempersempit ruang gerak masyarakat.

Secara keseluruhan, pola keterlibatan yang ada belum menunjukkan tanda-tanda pemberdayaan masyarakat yang substantif. Pembangunan desa masih bersifat top-down, sehingga belum mencerminkan semangat kemandirian dan keterlibatan aktif yang diharapkan dalam tata kelola desa yang demokratis.

2. Partisipasi dalam Implementasi/Pelaksanaan

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan

Temuan dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen menunjukkan bahwa keterlibatan warga Desa Guha dalam proyek pembangunan berada pada level yang cukup aktif. Namun, terdapat catatan penting: antusiasme ini sebagian besar dipicu oleh adanya insentif finansial atau upah, bukan murni kesadaran kolektif. Kontribusi masyarakat pun cenderung timpang, di mana tenaga fisik lebih banyak dikerahkan pada proyek infrastruktur yang kasatmata, sementara keterlibatan dalam aspek nonfisik seperti perencanaan atau pemikiran masih sangat minim.

Jika dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff, pola partisipasi di Desa Guha ini belum mencapai titik ideal. Menurut teori tersebut, keterlibatan yang sejati seharusnya bersifat inklusif, merata, dan tidak semata-mata bergantung pada imbalan materi atau jabatan formal. Partisipasi yang sehat menuntut adanya kemauan sukarela dari berbagai lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan di Desa Guha belum berjalan secara efektif. Kondisi ini belum mencerminkan semangat partisipasi yang representatif dan berkelanjutan, karena keterlibatan warga masih bersifat transaksional dan belum menyentuh akar pemberdayaan yang sesungguhnya.

b. Kontribusi tenaga atau dana dalam pelaksanaan program

Temuan lapangan yang dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, serta studi dokumentasi menunjukkan bahwa derajat keterlibatan warga Desa Guha dalam agenda pembangunan berada pada level "cukup baik", namun masih menyimpan banyak catatan kritis. Fenomena yang ditemukan di lapangan mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi; keterlibatan belum tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar warga cenderung bersikap pasif dan enggan terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi program secara mandiri.

Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah rendahnya nilai kesukarelaan (voluntary). Banyak warga yang hanya bersedia turun tangan apabila terdapat imbalan finansial atau upah, sehingga esensi gotong royong memudar. Selain itu, kontribusi fisik berupa bantuan material maupun dukungan dana dari swadaya masyarakat hampir tidak ditemukan sama sekali.

Jika dikomparasikan dengan perspektif teoritis Cohen dan Uphoff (sebagaimana dikutip dalam Hutagalung, 2022), realita di Desa Guha jelas menunjukkan diskrepansi yang signifikan terhadap standar partisipasi ideal. Teori tersebut menekankan pentingnya keterlibatan yang luas, proaktif, dan didasari oleh kesadaran tanpa paksaan atau motif transaksional. Singkatnya, mekanisme pembangunan di Desa Guha saat ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip partisipasi publik yang efektif dan berkelanjutan, karena masih terjebak pada partisipasi yang bersifat semu dan pragmatis.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

a. Menjaga Hasil Pembangunan

Temuan lapangan melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumen menunjukkan bahwa keterlibatan warga Desa Guha dalam mengawal keberlanjutan hasil pembangunan masih berada pada level yang rendah. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor fundamental, terutama minimnya kesadaran kolektif dan pola perilaku menjaga yang belum terinternalisasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, masih terdapat stigma kuat di tengah warga bahwa pemeliharaan fasilitas publik sepenuhnya merupakan kewajiban pemerintah, bukan tanggung jawab personal maupun kelompok.

Realitas di Desa Guha ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan dengan kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Dalam studi Hutagalung (2022), ditekankan bahwa esensi partisipasi bukan sekadar terlibat dalam pembangunan fisik, melainkan mencakup tumbuhnya rasa memiliki (sense of belonging), kepedulian, serta tanggung jawab moral untuk melindungi aset yang telah dibangun. Tanpa adanya fondasi psikologis ini, keberlanjutan infrastruktur akan sulit tercapai.

Secara strategis, penguatan aspek "menjaga" menjadi prioritas utama yang harus dibenahi. Masyarakat perlu diedukasi bahwa menjaga adalah langkah preventif dasar sebelum melangkah ke tahap "memelihara" yang lebih kompleks. Transformasi pola pikir ini krusial agar hasil pembangunan tidak sekadar menjadi monumen mati, melainkan manfaat yang terus dirasakan dalam jangka panjang melalui kontribusi aktif warga lokal.

b. Memelihara hasil Pembangunan

Temuan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa keterlibatan warga Desa Guha dalam menjaga hasil-hasil pembangunan masih berada pada level yang kurang memuaskan. Rendahnya partisipasi ini dipicu oleh tiga faktor utama: kurangnya kesadaran kolektif, minimnya inisiatif mandiri dari warga, serta kecenderungan untuk selalu menunggu arahan atau instruksi dari perangkat desa. Dampaknya, upaya perawatan infrastruktur maupun fasilitas publik menjadi tidak konsisten dan cenderung sporadis.

Realita di lapangan ini bertolak belakang dengan perspektif Cohen dan Uphoff (sebagaimana dikutip dalam Hutagalung, 2022). Menurut teori tersebut, esensi dari partisipasi pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi harus mencakup aspek pemeliharaan. Keterlibatan aktif dalam merawat hasil pembangunan sangat krusial untuk menjamin fungsionalitas dan keberlanjutan manfaat program dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan pada aspek pemeliharaan. Tanpa adanya peningkatan komitmen dari masyarakat, indikator keberhasilan partisipasi tidak akan tercapai secara maksimal. Diperlukan upaya edukasi agar masyarakat merasa memiliki (sense of belonging) terhadap setiap hasil pembangunan yang ada, sehingga keberlangsungannya tetap terjaga tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

a. Memberikan saran atau kritikan terhadap hasil Pembangunan

Temuan penelitian yang dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Guha memiliki responsivitas yang memadai terhadap aspirasi publik. Sikap terbuka perangkat desa dalam menerima berbagai masukan, kritik, serta saran dari warga mencerminkan iktikad baik dalam upaya perbaikan tata kelola desa. Meski demikian, implementasi nyata dari hasil evaluasi tersebut masih terhambat oleh keterbatasan anggaran operasional. Selain itu, belum adanya infrastruktur atau sistem formal yang mewadahi keterlibatan warga secara konsisten menjadi celah dalam proses perencanaan

pembangunan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan dengan perspektif Cohen dan Uphoff (sebagaimana dikutip dalam Hutagalung, 2022). Teori tersebut menekankan bahwa partisipasi evaluatif bukan sekadar pemberian masukan, melainkan keterlibatan aktif yang dampaknya terintegrasi langsung dalam kebijakan pembangunan selanjutnya. Di Desa Guha, interaksi yang terjadi masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan dengan kuat.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi evaluatif yang lebih terstruktur. Transformasi ini penting agar proses pengambilan keputusan di Desa Guha tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar merepresentasikan semangat partisipasi ideal yang mementingkan keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat luas.

b. Mengikuti kegiatan evaluasi atau rapat pertanggung jawaban

Temuan lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam agenda evaluasi maupun rapat pertanggungjawaban pembangunan masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi ini berakar pada ketiadaan mekanisme formal yang memfasilitasi warga untuk memberikan aspirasi atau kritik langsung terhadap capaian pembangunan di desa. Selama ini, masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek pasif yang tidak dilibatkan dalam proses peninjauan kembali hasil kerja pemerintah desa.

Realitas di Desa Guha ini menciptakan kesenjangan yang cukup lebar jika disandingkan dengan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff. Merujuk pada pemikiran mereka (dalam Hutagalung, 2022), partisipasi seharusnya mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam fase evaluasi untuk menilai kualitas pembangunan sekaligus memberikan saran konstruktif demi perbaikan di masa depan.

Namun, fakta menunjukkan bahwa tahapan krusial tersebut belum berjalan di Desa Guha. Tidak adanya ruang dialog dalam rapat pertanggungjawaban membuktikan bahwa prinsip keterlibatan masyarakat sebagai pengawas pembangunan belum terwujud secara optimal. Tanpa adanya pelibatan masyarakat secara langsung, proses evaluasi hanya menjadi formalitas birokrasi tanpa menyerap esensi kebutuhan dan penilaian riil dari warga setempat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

1. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Guha
 - a. Kurangnya Sistem Informasi & Koordinasi Pemerintah Desa
 - b. Kurangnya Kerjasama antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat
 - c. Rendahnya Keterlibatan Masyarakat Sejak Tahap Perencanaan Pembangunan
 - d. Lemahnya Upaya Sosialisasi dan Pernerdayaan Masyarakat
 - e. Kurangnya Keterbukaan dan Kesempatan yang Merata dalam Musyawarah Desa
2. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Guha
 - a. Adanya Sistem Informasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa
 - b. Terjalinnnya Kerja Sama antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat
 - c. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan melalui Perwakilan
 - d. Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - e. Tersedianya Forum Musyawarah Desa sebagai Wadah Partisipasi

SIMPULAN

Kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Guha, Kecamatan Batumandi, saat ini masih menunjukkan tren yang belum optimal. Berdasarkan empat parameter utama, yaitu pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi, ditemukan

berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat partisipasi aktif warga.

Dalam pengambilan keputusan, kehadiran warga pada forum Musrenbangdes sangat minim. Hal ini disebabkan oleh pola undangan yang bersifat terbatas pada tokoh formal seperti Ketua RT, kader, dan anggota BPD, sehingga aspirasi masyarakat umum kerap terabaikan. Sementara pada tahap pelaksanaan, meski warga terlibat dalam pembangunan fisik, keterlibatan tersebut cenderung bersifat pragmatis dan transaksional karena didorong oleh faktor upah, bukan murni inisiatif sosial.

Masalah berlanjut pada aspek pemanfaatan, di mana rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap fasilitas desa masih rendah. Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan kepada pemerintah desa. Terakhir, pada tahap evaluasi, tidak adanya mekanisme formal bagi warga untuk memberikan kritik secara langsung membuat pengawasan menjadi pasif. Hal ini bertentangan dengan teori Cohen dan Uphoff yang menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam menilai keberhasilan program demi perbaikan di masa depan.

Secara umum, hambatan utama dipicu oleh lemahnya koordinasi, sosialisasi yang minim, serta kurangnya transparansi dari pemerintah desa. Sebaliknya, faktor pendukung seperti keberadaan forum diskusi sebenarnya sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. (2022). *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irene, A. D. Y. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumiyati. (2019). *Implementasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mustanir, A. (2022). *Administrasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Makassar: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rizal, M. (2022). *Sosiologi Pembangunan: Teori dan Dinamika Partisipasi*. Surabaya: Media Akademika.
- Slamet, Y. (2014). *Pembangunan Masyarakat: Teori dan Terapan dalam Perspektif Sosiologis*. Surakarta: UNS Press.
- Theresia, A., dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.